



Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

Sofia Nur Oktaviani^{1*}, Weni Rosdiana²

¹⁻² Program Studi D-IV Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email : sofia.22099@mhs.unesa.ac.id^{1*}, wenirosdiana@unesa.ac.id²

*Penulis Korespondensi: sofia.22099@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The Ten Scholars per Village Scholarship Program (SESAR) is an initiative of the Bojonegoro Regency Government to expand access to higher education for rural communities. This study evaluates the implementation of the program using the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The evaluation was conducted through interviews, document analysis, observations, and information from program implementers to assess policy relevance, resource readiness, process quality, and achieved outcomes. The results indicate that the program is relevant to the goal of educational equity; however, the distribution of beneficiaries has not been even due to differences in the number of applicants and socio-economic conditions among villages. In terms of context, the program aligns with the need for equitable access to higher education, although beneficiary distribution remains uneven. From the input perspective, regulations and funding are adequate, but administrative requirements and higher education accreditation criteria still limit potential applicants. Regarding the process, the selection mechanism follows the established guidelines; nevertheless, socialization remains insufficient, document verification poses challenges, and fund disbursement is often delayed. In the product aspect, the program provides tangible benefits by supporting the continuity of higher education for rural students, although its overall effectiveness still requires improvement.*

Keywords: CIPP; Higher Education; Program Evaluation; SESAR Scholarship; Village.

Abstrak. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa (SESAR) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode evaluasi dilakukan melalui analisis wawancara, dokumen, observasi, serta informasi dari pelaksana program untuk menilai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, kualitas proses, dan hasil yang dicapai. Hasil menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan pemerataan pendidikan, namun realisasi penerima tidak merata karena perbedaan jumlah lulusan masyarakat yang melanjutkan pendidikan dan kondisi sosial ekonomi antar desa. Dari sisi *context*, program dinilai relevan dengan kebutuhan pemerataan pendidikan tinggi, namun realisasi penerima belum merata akibat perbedaan jumlah pengajuan antar desa, dan kondisi sosial ekonomi antar desa. Dari sisi *input*, regulasi dan pendanaan telah memadai, tetapi persyaratan administrasi serta ketentuan akreditasi perguruan tinggi masih membatasi kesempatan calon penerima. Pada aspek *process*, mekanisme seleksi telah berjalan sesuai petunjuk teknis, namun sosialisasi belum optimal, verifikasi berkas masih menjadi kendala, dan pencairan dana kerap mengalami keterlambatan. Sementara itu, pada aspek *product*, program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dalam mendukung keberlanjutan studi di pendidikan tinggi, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Beasiswa SESAR; CIPP; Desa; Evaluasi Program; Pendidikan Tinggi.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan daerah. Secara umum, pendidikan oleh (Nasution et al., 2025) didefinisikan sebagai proses sistematis yang memungkinkan individu mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan keterampilan praktis agar dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan pembangunan. Akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadi indikator penting dalam pembangunan kabupaten karena mampu mendorong terciptanya tenaga profesional yang kompeten dan berdaya saing. Namun, dalam praktiknya,

masih terdapat berbagai kendala yang menghambat akses tersebut, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, minimnya informasi mengenai jalur pendidikan tinggi, serta rendahnya kesiapan akademik bagi calon mahasiswa dari desa-desa terpencil.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk hadir sebagai fasilitator dan penyelenggara pelayanan publik yang mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang responsif, efektif, dan inklusif. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui penyediaan program beasiswa daerah, yang bertujuan membuka peluang pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat. Beasiswa (Misra et al., 2022) merupakan bantuan finansial kepada pelajar atau mahasiswa untuk mendukung kelangsungan studi, yang tidak hanya meringankan beban biaya tetapi juga membuka kesempatan pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Kabupaten Bojonegoro, memberikan komitmennya dengan perluasan akses pendidikan tinggi melalui berbagai regulasi, dimulai dari Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020, yang memperluas cakupan jenis beasiswa, meliputi Beasiswa Dua Sarjana Per Desa, Beasiswa Scientis, dan Beasiswa Tugas Akhir. Program-program ini menjadi sarana strategis untuk mencetak generasi muda yang unggul, profesional, dan memiliki daya saing tinggi, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Melihat tingginya kebutuhan akses pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan penguatan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Regulasi ini secara signifikan meningkatkan kuota Beasiswa Dua Sarjana Per Desa menjadi Sepuluh Sarjana Per Desa (Beasiswa SESAR). Perubahan ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pendidikan, tetapi juga mencerminkan strategi peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Pelaksanaan Program Beasiswa SESAR dilakukan secara periodik sesuai kalender akademik, melalui dua semester (Ganjil dan Genap), yang masing-masing terdiri dari dua tahapan: Tahap I A dan I B pada semester Ganjil, serta Tahap II A dan II B pada semester Genap. Tahap I A dan II A diperuntukkan bagi penerima lanjutan dan masyarakat yang sudah siap mengajukan berkas sejak awal periode, sedangkan Tahap I B dan II B mengakomodasi calon penerima baru yang belum sempat mendaftar pada tahap sebelumnya. Skema berlapis ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pengajuan.

Antusiasme masyarakat terhadap peningkatan kuota beasiswa ini cukup tinggi. Peningkatan alokasi dari 2 menjadi 10 sarjana per desa telah membuka peluang yang jauh lebih luas bagi masyarakat desa untuk menempuh pendidikan tinggi. Data penerima Beasiswa

SESAR pada Tahap II B tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 2.768 penerima dari target 4.300 penerima, atau sekitar 64,37%. Sebaran penerima berdasarkan kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Presentase Sebaran Penerima Beasiswa SESAR se-Kabupaten Bojonegoro.

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Ngasem	17	170	100	58.82
2	Bubulan	5	50	30	60.00
3	Kedungadem	23	230	140	60.87
4	Gondang	7	70	44	62.86
5	Balen	23	230	202	87.83
6	Sekar	6	60	28	46.67
7	Kepohbaru	25	250	198	79.20
8	Kanor	25	250	186	74.40
9	Kapas	21	210	171	81.43
10	Temayang	12	120	76	63.33
11	Tambakrejo	18	180	78	43.33
12	Purwosari	12	120	54	45.00
13	Malo	20	200	58	29.00
14	Trucuk	12	120	79	65.83
15	Padangan	16	160	74	46.25
16	Kasiman	10	100	59	59.00
17	Kalitidu	18	180	121	67.22
18	Bojonegoro	18	180	149	82.78
19	Margomulyo	6	60	5	8.33
20	Dander	16	160	119	74.38
21	Sukosewu	14	140	106	75.71
22	Sugihwaras	17	170	105	61.76
23	Baureno	25	250	167	66.80
24	Sumberrejo	26	260	222	85.38
25	Ngraho	16	160	84	52.50
26	Kedewan	5	50	11	22.00
27	Ngambon	5	50	25	50.00
28	Gayam	12	120	77	64.17
Total		430	4.300	2.768	64.37

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui adanya ketimpangan capaian antar kecamatan. Kecamatan seperti Balen, Sumberrejo, Bojonegoro, Kapas, dan Kepohbaru memiliki realisasi di atas 75%, sedangkan kecamatan Margomulyo, Kedewan, dan Malo masih di bawah 30%. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas administrasi desa, distribusi informasi, kesiapan masyarakat, serta akses terhadap proses pengajuan beasiswa. Persoalan tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat mekanisme sosialisasi, pendampingan, serta monitoring agar tujuan pemerataan pendidikan tinggi dapat tercapai secara optimal.

Meskipun program ini dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang bermanfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai potensi hambatan, terutama terkait prosedur administrasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan. Ketimpangan capaian antar kecamatan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui efektivitas kebijakan, kesesuaian implementasi dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023, serta mekanisme pengelolaan sumber daya dan layanan. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai apakah suatu program berjalan sesuai rencana, apakah input yang meliputi sumber daya, dana, personel telah memadai, dan apa dampak nyata dari program (Agung et al., 2022). Dalam konteks kebijakan beasiswa afirmatif, evaluasi tidak boleh hanya melihat hasil akhir (output), tetapi juga harus menyentuh kualitas seleksi, transparansi administrasi, dan mekanisme pengelolaan program agar keadilan dan akuntabilitas dapat dijamin.

Dengan menggunakan kerangka evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam (2003), penilaian dapat dilakukan mulai dari konteks program, kesiapan sumber daya, kualitas pelaksanaan, hingga hasil sementara program. Evaluasi juga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan afirmatif, memastikan distribusi manfaat lebih merata, serta meningkatkan kualitas tata kelola beasiswa di tingkat desa. Dengan menggunakan kerangka evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam, penilaian dapat dilakukan secara komprehensif dan berlapis (Aristya, 2023). Evaluasi konteks (*context*) menilai sejauh mana program sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan latar belakang masyarakat. Evaluasi *input* mengkaji kesiapan sumber daya, seperti alokasi anggaran, fasilitas, personel, dan proses seleksi peserta dengan tujuan untuk memastikan bahwa program tidak kekurangan dukungan dasar (Rama et al., 2023). Selanjutnya, evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan program untuk menilai prosedur administratif, sistem monitoring, dan mekanisme akuntabilitas telah berjalan efektif dan konsisten (Pratiwi et al., 2019). Terakhir, evaluasi produk menilai hasil akhir dan dampak program, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, serta bagaimana capaian itu berkontribusi pada tujuan kebijakan afirmatif (Mukarromah & Ibrahim, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih adil dan efektif.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi karena hasil evaluasi Program Beasiswa SESAR akan memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan, hambatan, dan peluang pengembangan program ke depan. Evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dituangkan melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2023 dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam memperbaiki prosedur administrasi, memaksimalkan partisipasi warga, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan beasiswa.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan, efektivitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap peserta atau masyarakat (Stufflebeam, 2003). Salah satu kerangka evaluasi yang banyak digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product), yang menekankan penilaian komprehensif terhadap empat aspek utama program.

Context (konteks) menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan dan masalah yang melatarbelakangi program. Dalam konteks Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, evaluasi konteks meliputi analisis kebutuhan pendidikan tinggi di tingkat desa, distribusi peluang pendidikan, dan kesesuaian program dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

Input (masukan) menilai sumber daya dan strategi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Aspek ini mencakup ketersediaan dana beasiswa, kualitas administrasi, tenaga pendukung, serta prosedur seleksi dan sosialisasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Evaluasi input penting untuk memastikan bahwa program memiliki fondasi yang memadai sebelum implementasi.

Process (proses) menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan program. Evaluasi proses pada program beasiswa ini mencakup mekanisme seleksi, verifikasi berkas, pencairan dana, serta koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, dan perguruan tinggi. Analisis proses membantu mengidentifikasi hambatan, praktik terbaik, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan program.

Product (produk/hasil) menilai output dan outcome dari program. Pada Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, produk dapat diukur dari jumlah mahasiswa yang berhasil menerima beasiswa, capaian akademik (IPK), keberlanjutan studi, serta dampak sosial-ekonomi bagi keluarga dan masyarakat desa. Evaluasi produk memberikan gambaran keberhasilan program serta dasar rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa depan.

Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa

Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa (SESAR) adalah program afirmatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa, diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 dan diperkuat Pasal 4A Perbup Nomor

34 Tahun 2023. Setiap desa dapat mengirimkan maksimal sepuluh mahasiswa S1/D4 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substantif, dengan tujuan meningkatkan pemerataan kuliah antarwilayah, mengurangi hambatan biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu, dan mencetak lulusan sarjana yang berpotensi berkontribusi pada pembangunan lokal.

Pendanaan program bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan dengan skema *at cost*, dibayarkan sesuai tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi. Kriteria penerima mencakup mahasiswa aktif S1/D4, penduduk Bojonegoro, lulusan SMA/ sederajat berprestasi akademik dan berasal dari keluarga tidak mampu, memiliki IPK minimal 2,75 atau berprestasi, serta tidak menerima beasiswa lain. Mekanisme seleksi, verifikasi, dan penyaluran diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas Pendidikan. Program ini bertujuan memperkuat kualitas SDM melalui pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, peningkatan kapasitas akademik, dan partisipasi generasi muda desa dalam pembangunan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan kualitatif menurut (Sugiyono, 2023) adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, pendidikan, atau perilaku manusia secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan konteks sosial para penerima beasiswa serta pelaksana program.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penerima beasiswa, pejabat Dinas Pendidikan, kepala desa, dan staf administrasi, serta melalui observasi proses verifikasi dan pencairan. Studi dokumen seperti laporan pertanggungjawaban, juknis, dan daftar penerima juga dianalisis. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman (1994) dalam Sugiyono, (2023) melalui tiga tahap, yaitu Reduksi data untuk memilih informasi yang relevan dari transkrip dan dokumen, Display data dalam bentuk tabel dan matriks tematik, dan Penarikan/verifikasi kesimpulan dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

Informan dipilih secara purposive hingga tercapai saturasi data, dan penelitian mematuhi prinsip etika, termasuk izin resmi, informed consent, dan perlindungan identitas informan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas, kendala, dan rekomendasi perbaikan program beasiswa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa (SESAR) dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003). Suatu program dapat berhasil apabila pelaksana kebijakan atau pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan atau program sesuai dengan kemampuan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya (Refandi, 2025). Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang didapat setelah kebijakan dilaksanakan, serta mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang (Sari et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya, mutu pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.

Evaluasi Konteks (*Context*)

Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa (SESAR) dirancang sebagai kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mendorong pemerataan kesempatan belajar di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. Secara regulatif, program ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 dan ketentuan teknis yang dikuatkan melalui petunjuk pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan data kependudukan yang sah (KTP dan KK) untuk memastikan bahwa sasaran penerima benar-benar merupakan warga Bojonegoro. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Fadhil & Amra (2021), yang menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dan verifikasi berbasis data kependudukan menjadi elemen penting dalam efektivitas program beasiswa.

Dari sisi kebutuhan (need assessment), program ini sangat relevan karena tingkat melanjutkan kuliah di beberapa kecamatan masih rendah, khususnya wilayah pinggiran dan desa yang memiliki keterbatasan ekonomi, informasi, dan kesiapan akademik. Data realisasi penerima pada Tahap II B Tahun 2024 menunjukkan masih adanya ketimpangan capaian antar kecamatan. Kecamatan seperti Margomulyo (8,33%), Kedewan (22%), dan Malo (29%) memiliki capaian jauh di bawah target. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan intervensi pemerataan pendidikan masih sangat besar, terutama bagi desa yang jumlah lulusan SMA rendah, akses informasi terbatas, atau memiliki hambatan sosial-ekonomi.

Selain itu, konteks sosial ekonomi masyarakat desa turut mempengaruhi keterjangkauan pendidikan tinggi. Banyak keluarga pra-sejahtera yang meskipun memiliki anak berprestasi, tidak dapat membiayai UKT dan kebutuhan kuliah lainnya. Program SESAR menjawab masalah ini melalui pembiayaan at cost untuk UKT, sehingga mengurangi beban ekonomi

keluarga. Namun, dibutuhkan penyempurnaan strategi agar distribusi manfaat tidak timpang dan semakin merata antar desa.

Evaluasi Input (*Input*)

Aspek input mencakup kesiapan regulasi, pendanaan, sumber daya manusia, serta mekanisme pendukung pelaksanaan program. Untuk program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa (SESAR), secara umum terdapat fondasi kebijakan yang memadai, namun berbagai kerentanan teknis dan administratif masih perlu diperhatikan agar pelaksanaan program benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Program SESAR didasari oleh regulasi daerah dan petunjuk teknis yang merinci kriteria penerima, mekanisme seleksi, serta proses pencairan dana, sehingga memberi kerangka hukum yang jelas dan akuntabel. Namun, sejumlah ketentuan seperti syarat akreditasi perguruan tinggi dan persyaratan administrasi—misalnya legalisasi dokumen, surat keterangan, SKTM, serta keterhubungan data bansos seperti PKH, KPP, KIS, dan KPM, sering menjadi hambatan bagi calon dari desa yang berkuliah di kampus kecil atau bekerja dalam keluarga sektor informal. Literatur evaluasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa regulasi yang kaku tanpa fleksibilitas dapat memicu *exclusion error*, yaitu peserta yang sebenarnya layak tetapi gugur karena ketidaklengkapan dokumen administratif. Dengan demikian, meskipun regulasi kuat, penyempurnaan pada sisi fleksibilitas dan validasi alternatif sangat diperlukan.

Skema pendanaan *at cost* berdasarkan UKT memberikan dasar pembiayaan yang transparan, memastikan seluruh komponen biaya pendidikan dapat terpenuhi sesuai nominal kampus. Stabilitas pendanaan dari APBD menjadi modal penting agar program dapat berjalan secara konsisten dan tidak mengikuti fluktuasi fiskal. Namun, efektivitas input pendanaan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga ketepatan waktu pencairan. Apabila pencairan terjadi setelah batas registrasi akademik, penerima tetap berisiko mengalami keterlambatan pembayaran UKT atau kesulitan mengurus administrasi kampus.

Pelaksana program berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki struktur tugas formal sesuai Petunjuk Teknis, mulai dari sosialisasi, layanan informasi, verifikasi administrasi, hingga penetapan penerima manfaat. Dari sisi regulasi internal, keberadaan SOP yang mengatur alur layanan membuat standar kompetensi SDM sebenarnya sudah terdefinisi dengan jelas. Namun, dalam praktik pelaksanaan, kapasitas SDM yang tidak merata—terutama pada pejabat atau staf yang menangani periode pendaftaran dalam jumlah berkas yang tinggi—seringkali menyebabkan keterlambatan proses verifikasi. Hal ini sejalan dengan Rahawarin et al., (2025) bahwa peningkatan kuota penerima beasiswa tanpa diikuti penguatan sistem pelaksanaan berpotensi menurunkan efektivitas program

secarakeseluruhan.. Tanpa penguatan pelatihan teknis yang berkelanjutan, risiko salah input data, kekeliruan dalam membaca dokumen administrasi, atau penolakan berkas yang sebenarnya valid tetap dapat terjadi.

Sedangkan, sosialisasi program selama ini dilakukan melalui pemerintah desa, media sosial, dan surat edaran, namun pendekatan komunikasi berbasis dokumen atau daring tidak selalu menjangkau masyarakat dengan literasi rendah atau akses digital terbatas. Studi mengenai *outreach* program beasiswa menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang efektif memerlukan kombinasi antara media formal dan pendekatan langsung ke komunitas. Desa dengan capaian penerima rendah umumnya adalah desa yang minim sosialisasi tatap muka, tidak memiliki pendampingan administrasi, atau kurang memahami prosedur pendaftaran. Oleh karena itu, input berupa strategi komunikasi perlu diperkuat melalui kegiatan sosialisasi langsung, lokakarya desa, dan pendampingan pendaftaran agar seluruh calon memiliki peluang yang sama untuk memenuhi persyaratan.

Evaluasi Proses (*Process*)

Evaluasi proses berfokus pada bagaimana mekanisme program SESAR dijalankan mulai dari sosialisasi, pendaftaran oleh masyarakat, verifikasi administrasi, hingga penetapan penerima dan pencairan Dana Beasiswa. Proses sosialisasi program SESAR dilaksanakan melalui pemerintah desa, akun resmi Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta penyebaran surat edaran ke seluruh kecamatan. Metode ini terbilang efektif menjangkau desa dengan tingkat literasi digital tinggi, tetapi belum merata di desa yang minim akses informasi. Keterbatasan sosialisasi program berpengaruh terhadap rendahnya jumlah pendaftar, khususnya di wilayah dengan akses informasi yang terbatas (Hawingnyo, 2015). Dalam sejumlah kasus, calon penerima beasiswa mengetahui program ini bukan melalui kanal resmi, tetapi dari cerita antarwarga, sehingga informasi yang diterima tidak selalu tepat. Hal ini sejalan dengan (Yuliani, 2021) bahwa sosialisasi yang tidak seragam dapat menciptakan information gap dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi SESAR perlu diperkuat melalui kunjungan lapangan dan pendampingan langsung di desa berkapasitas rendah.

Pada tahap implementasi, desa yang memiliki aparatur administrasi kuat cenderung lebih cepat memproses penyebaran informasi kepada keluarga sasaran. Sebaliknya, desa dengan jumlah perangkat terbatas sering kali tidak mampu melakukan sosialisasi intensif, sehingga terjadi disparitas tingkat pendaftar antarwilayah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa proses program masih sangat bergantung pada kapasitas lokal daripada mekanisme yang terstandar. Penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan harus mengurangi

ketergantungan pada kapasitas lokal melalui standarisasi proses komunikasi. Dengan demikian, proses sosialisasi SESAR masih perlu diselaraskan agar peluang masyarakat desa benar-benar merata.

Secara keseluruhan, proses sosialisasi berjalan namun belum optimal untuk menjangkau kelompok rentan atau keluarga dengan literasi administrasi rendah. Penyampaian informasi melalui media sosial juga tidak cukup efektif bagi rumah tangga miskin yang tidak aktif menggunakan platform digital. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan under-coverage, yaitu kondisi ketika keluarga yang seharusnya memenuhi syarat tidak mengajukan permohonan.

Selanjutnya, proses pendaftaran program SESAR dimulai dari penyebaran informasi oleh Dinas Pendidikan melalui surat resmi, media sosial, website, dan penyampaian kepada pemerintah desa. Desa berfungsi sebagai perantara informasi, tetapi pengajuan dokumen dilakukan langsung oleh masyarakat ke Dinas Pendidikan melalui luring dengan datang pada Dinas Pendidikan langsung. Mekanisme ini sebenarnya mempermudah kontrol kualitas berkas karena pemeriksaan awal dilakukan langsung oleh petugas dinas, bukan melalui banyak tahapan. Namun, sebagian masyarakat masih mengalami kendala administratif.

Bagi pemohon lanjutan yang sebelumnya sudah lolos, mahasiswa penerima lama cukup mengajukan perpanjangan setiap semester, sedangkan pendaftar baru hanya dapat diterima apabila kuota desa masih tersedia. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat IPK tertinggi setelah memenuhi syarat minimal 2,75. Meskipun mekanisme tersebut bersifat objektif, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap alur seleksi belum merata. Banyak pendaftar belum mengetahui bahwa:

- a. Kuota sepuluh sarjana berlaku seterusnya, tidak dibuka kuota baru per tahun, dimana desa yang sebelumnya sudah terpenuhi, maka pendaftar baru tidak akan bisa masuk
- b. IPK tertinggi menjadi dasar seleksi hanya ketika pendaftar melebihi kuota,
- c. Mahasiswa penerima tidak boleh menerima beasiswa dari sumber lain,
- d. Beasiswa hanya diberikan kepada Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS haPerguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berlokasi di Bojonegoro dengan Akreditasi minimal B (Baik).

Dari sisi ketentuan akademik, syarat akreditasi minimal B untuk perguruan tinggi Swasta menjadi salah satu penyebab tingginya penolakan berkas di tahap verifikasi dinas. Banyak mahasiswa yang kuliah di kampus swasta kecil atau kampus luar daerah belum

memenuhi syarat akreditasi, sehingga mereka otomatis tidak lolos meskipun membutuhkan bantuan.

Secara keseluruhan, proses pendaftaran SESAR dinilai jelas, tetapi masih menghadapi tantangan pada kualitas dokumen yang diserahkan masyarakat. Sistem yang sudah terpusat di Dinas Pendidikan memang mengurangi risiko salah verifikasi antarlevel pemerintahan, tetapi meningkatkan beban kerja petugas saat gelombang pendaftaran tinggi. Integrasi antara sosialisasi desa dan pelayanan dinas perlu diperkuat agar masyarakat memahami langkah-langkah pendaftaran tanpa bergantung pada pendampingan intensif. Dengan demikian, efektivitas proses pendaftaran dapat meningkat sekaligus mengurangi jumlah berkas yang harus dikembalikan akibat kesalahan teknis.

Pada tahap verifikasi administrasi dilakukan sepenuhnya oleh tim Dinas Pendidikan berdasarkan SOP dalam Juknis SESAR. Karena masyarakat mengajukan langsung ke dinas, petugas memiliki akses penuh untuk mengecek kelengkapan dan keabsahan berkas sejak tahap awal, mencocokkan data kependudukan, bukti kemampuan ekonomi seperti PKH/KIS/KPP/KPM, serta dokumen akademik mahasiswa. Mekanisme ini memperkuat akurasi verifikasi, namun volume pemohon dalam waktu singkat menjadikan proses memerlukan ketelitian tinggi. Beban kerja besar tanpa dukungan sistem digital yang optimal dapat meningkatkan risiko kesalahan verifikasi atau berkas tidak terbaca (Mahfud, 2021).

Beberapa pengembalian berkas terjadi karena dokumen tidak lengkap, berkas scan tidak asli, atau dokumen resmi tidak memiliki stempel atau tanda tangan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada pemohon dalam menyiapkan dokumen administrasi yang sesuai standar, bukan pada proses di desa. Selanjutnya, tahap penetapan penerima dilakukan setelah verifikasi selesai dan diumumkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengumuman resmi. Meskipun prosedur transparan, sebagian pemohon merasa kurang memperoleh informasi memadai terkait alasan penolakan, karena surat pemberitahuan masih bersifat umum. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme klarifikasi dan layanan teknis bagi pemohon, seperti pengecekan dokumen awal atau bimbingan persiapan berkas, sangat penting untuk memperkuat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program SESAR.

Pencairan dana Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa (SESAR) mengikuti mekanisme bertahap sesuai tagihan UKT yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, yakni dalam setiap tahun terdapat dua (2) pengajuan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala berupa keterlambatan pencairan dana beasiswa. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diterapkan. Dalam kondisi seperti ini, apabila keterlambatan memang dipengaruhi oleh proses

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai OPD yang berwenang mencairkan dana, Dinas Pendidikan selaku OPD pengelola semestinya menyampaikan pemberitahuan resmi kepada mahasiswa mengenai adanya kendala teknis tersebut. Minimnya komunikasi menyebabkan mahasiswa kebingungan dan menimbulkan keresahan karena pencairan tidak sesuai dengan tenggat waktu, sementara mereka sangat bergantung pada beasiswa ini untuk pembayaran UKT semester berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ardita et al., (2025), bahwa keterlambatan pencairan dana yang sistematis dapat mengurangi efektivitas tujuan bantuan pendidikan karena berpotensi mengganggu registrasi akademik mahasiswa. Situasi ini mengindikasikan bahwa *evaluation process* perlu meninjau ulang kualitas koordinasi lintas OPD, kejelasan alur informasi, serta ketepatan manajemen waktu agar tujuan program dalam memberikan bantuan pendidikan secara tepat waktu dan tepat sasaran—dapat benar-benar terwujud

Dalam praktiknya, minimnya komunikasi resmi dari Dinas Pendidikan mengenai keterlambatan pencairan sering menimbulkan kebingungan dan keresahan mahasiswa, karena mereka tidak memperoleh informasi jelas mengenai status pencairan atau alasan penundaan. Situasi ini menekankan pentingnya penyusunan SOP monitoring berbasis digital serta layanan bantuan mahasiswa yang memadai, sehingga alur komunikasi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan Dinas Pendidikan lebih tertib dan transparan. Secara keseluruhan, meskipun proses pencairan dan monitoring sudah berjalan, efisiensi dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Optimalisasi koordinasi lintas OPD, kejelasan alur informasi, serta mekanisme monitoring berbasis digital menjadi langkah penting agar manfaat SESAR benar-benar diterima mahasiswa tepat waktu dan tepat penggunaan.

Evaluasi Produk (*Product*)

Evaluasi produk berfokus pada capaian nyata yang dihasilkan oleh Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa (SESAR), baik dari sisi output, outcome, maupun dampak jangka panjang yang mulai terlihat selama program berjalan. Program ini berhasil memberikan bantuan pendidikan kepada ribuan mahasiswa dari berbagai desa di Kabupaten Bojonegoro. Banyak mahasiswa penerima menyatakan bahwa beasiswa ini sangat membantu keberlanjutan studi mereka, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi tidak mampu menanggung biaya UKT secara mandiri. Dampak langsung dari program SESAR terlihat dari meningkatnya jumlah mahasiswa aktif dari desa-desa yang sebelumnya minim partisipasi pendidikan tinggi.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian produk program tidak merata antar desa. Sejalan dengan itu, Winarti et al., (2023), bahwa ketimpangan realisasi penerima antar wilayah menunjukkan bahwa tujuan pemerataan akses pendidikan belum

sepenuhnya tercapai. Desa yang memiliki banyak lulusan SMA dan jumlah mahasiswa aktif lebih tinggi cenderung mengalami kompetisi yang ketat, sehingga sebagian mahasiswa yang berpotensi tidak dapat terfasilitasi karena kuota hanya sepuluh orang per desa. Sebaliknya, desa yang tidak memiliki mahasiswa aktif atau minim lulusan SMA tidak dapat memenuhi kuota, sehingga beasiswa tidak dapat tersalurkan meskipun anggaran tersedia. Ketidakseimbangan ini membuat tingkat realisasi penerima beasiswa tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pendidikan masyarakat secara agregat, tetapi lebih dipengaruhi struktur demografis setiap desa.

Dari sisi kualitas penerima, IPK mahasiswa penerima cenderung berada di atas standar minimal yang ditetapkan. Banyak penerima bahkan menunjukkan peningkatan prestasi akademik setelah mendapatkan beasiswa, karena beban biaya pendidikan yang berkurang membuat mereka dapat fokus belajar. Ini menunjukkan bahwa secara substantif, program SESAR berhasil meningkatkan motivasi belajar dan stabilitas pendidikan mahasiswa penerimanya.

Namun beberapa indikator produk juga menunjukkan kendala. Pertama, banyak mahasiswa dari keluarga rentan ekonomi gagal menjadi penerima karena tidak memiliki dokumen bantuan sosial, sehingga mereka tidak diperhitungkan sebagai sasaran meskipun membutuhkan. Kedua, keterlambatan pencairan membuat mahasiswa, khususnya dari PTN yang sering kesulitan memenuhi jadwal pembayaran UKT semester berikutnya. Hal ini mengurangi efektivitas produk program karena tujuan inti beasiswa adalah memastikan keberlanjutan pendidikan tepat waktu. Ketiga, ketentuan akreditasi minimal B untuk PTS di Bojonegoro menyebabkan banyak mahasiswa yang sudah terdaftar di kampus lokal tidak bisa dibantu, padahal kondisi ekonomi mereka sama rentannya.

Evaluasi produk menunjukkan bahwa program SESAR berhasil meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi sebagian besar penerima, tetapi belum mampu menghasilkan pemerataan capaian antar kecamatan dan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa (SESAR) memiliki dasar regulasi yang jelas, mekanisme pendanaan berbasis *at cost*, serta struktur pelaksana yang terorganisasi di bawah Dinas Pendidikan. Program ini dinilai relevan dengan kebutuhan peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa dan selaras dengan kebijakan daerah. Namun demikian, pemahaman sasaran program terkait tujuan dan mekanisme pelaksanaannya belum merata di seluruh desa. Dari sisi input, dukungan anggaran, regulasi, dan kelembagaan telah

tersedia, tetapi kualitas data pemohon serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana, khususnya dalam proses verifikasi, masih perlu ditingkatkan. Pada tahap proses, pelaksanaan program secara umum telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, meskipun masih dihadapkan pada kendala ketepatan waktu pencairan dana, kelengkapan administrasi pemohon, serta efektivitas sosialisasi dan layanan informasi. Dari aspek produk, Program SESAR telah memberikan manfaat nyata dalam mendukung keberlanjutan studi mahasiswa desa yang memiliki keterbatasan finansial, namun pemerataan manfaat dan ketepatan sasaran penerima masih belum sepenuhnya optimal.

Saran

Pada aspek konteks, diperlukan pemetaan kebutuhan pendidikan tinggi di setiap desa serta pemerataan sosialisasi program agar ketimpangan jumlah penerima dapat diminimalkan. Dari aspek input, penyederhanaan persyaratan administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana perlu dilakukan guna memperluas akses calon penerima beasiswa. Pada aspek proses, penguatan sosialisasi program dan mekanisme verifikasi berkas menjadi penting, disertai dengan penjadwalan pencairan dana yang lebih jelas dan tepat waktu. Sementara itu, dari aspek produk, monitoring dan evaluasi berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan studi penerima beasiswa serta mengoptimalkan dampak program dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, A., Ekayana, G., & Ratnaya, I. G. (2022). Evaluasi kurikulum program sarjana sistem komputer menggunakan model CIPP Stufflebeam. 6(3), 366–376.
- Ardita, I. M., Werang, B. R., & Ariawan, I. P. W. (2025). Evaluasi program penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). 9(1), 164–172.
- Aristya, S. (2023). CIPP: Implementasi model evaluasi pendidikan. 5(1), 72–81.
- Fadhil, I. R., & Amra. (2021). Providing equity of access to higher education in Indonesia: A policy evaluation Ihsan. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education*, 3(1), 57–75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Hawingnyo. (2015). Evaluasi program beasiswa unggulan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Derivatif*, 9(2).
- Mahfud, M. (2021). Evaluasi verifikasi program bantuan pendidikan menggunakan model CIPP. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Misra, I., Sadikin, A., & Adlina, F. (2022). Evaluation of Bidikmisi scholarship program at state Islamic universities in Indonesia. 26(1), 26–36.
- Mukarromah, L., & Ibrahim, M. M. (2023). Evaluasi program character building berbasis model CIPP (Context, Input, and Product) di Sekolah Alam Insan Kamil Kabupaten Gowa. 08(02).

- Nasution, I., Faeyza, A., Lestari, I., & Aini, N. (2025). Evaluasi program pendidikan. 6(1), 23–32.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2019). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Tinggi*. Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Tinggi*. Bojonegoro.
- Pratiwi, M., Ridwan, & Waskito. (2019). Evaluasi teaching factory model CIPP. 3(1), 414–421.
- Rahawarin, B., Ahmad, M., Pendidikan, M., Jakarta, U. N., Inggris, P. B., & As-syafiiyah, U. I. (2025). Efektivitas program bantuan beasiswa pendidikan dalam mengurangi siswa putus sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12, 1053–1067.
- Rama, A., Ambiyar, A., Rizal, F., Jalinus, N., Waskito, W., & Ema, R. (2023). Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan. 8(1), 82–86.
- Refandi, A. D. (2025). Implementasi program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Eprints.Ipdn*, 1–11. <http://eprints.ipdn.ac.id/20295/>
- Sari, E. A., Huda, M. M., & Bojonegoro, U. (2024). Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro. 9(2), 172–186.
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP model for evaluation: An update, a review of the model's development, and a checklist to guide implementation* (Internatio). Kluwer Academic Publishers.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. (2023). Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: Analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. 49(2), 210–225. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.35793246>
- Yuliani, S. (2021). Evaluasi model CIPP pada program beasiswa PIP. *Jurnal Kebijakan Pendidikan UNY*.